

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, 2006, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, PT. Bina Putra, Jakarta.
- Kusnu Goesnadhie, 2010, *Harmonisasi Sitem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Trisnantoro, Laksono, 2005, *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Karya Ilmiah, Jurnal dan Makalah

- Aminah, Siti Mardiatul, 2013, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Damayana, Sri Nur, 2016, “Pelaksanaan Regulasi Pusat Dan Daerah Mengenai Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gaol, Jubeltim Lumban, 2006, “Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara”, *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Humas, Sekretariat Kabinet RI, “BPS : Per September 2016, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berkurang 0,25 Juta”, <http://setkab.go.id/bps-per-september-2016-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-bekurang-025-juta/>, diakses pada tanggal : 25 September 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fakir”, <https://kbbi.web.id/fakir>, diakses pada tanggal : 13 Oktober 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Miskin”, <https://kbbi.web.id/miskin>, diakses pada tanggal : 13 Oktober 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “rumah sakit”, <https://kbbi.web.id/rumah%20sakit>, diakses pada tanggal : 27 September 2017.
- LombokPost, “12.778 warga miskin ikut BPJS Kesehatan”, <http://www.lombokpost.net/2017/01/23/12-778-warga-miskin-ikut-bpjs-kesehatan/>, diakses pada tanggal : 28 September 2017.
- UNICEF, “Kesehatan Ibu & Anak”, https://www.unicef.org/indonesia/id/A5_-_B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf, diakses pada tanggal : 27 September 2017.